

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi keuangan daerah memberi angin segar kepada daerah untuk mengelola keuangan rumah tangga daerahnya sendiri dengan lebih otonom karena memang telah disadari bahwa yang lebih mengerti persoalan daerah adalah daerah itu sendiri. Kesempatan akan segera diperoleh daerah untuk membuktikan kemandiriannya. Namun ini juga sekaligus sebagai tantangan yang tidak ringan.

Penetapan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 oleh pemerintah, mengenai Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berimplikasi pada tuntutan otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik yang nyata yang harus diberikan kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, undang-undang ini diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Kedua undang-undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD). Begitu pula dengan Paradigma pengelolaan keuangan daerah menuntut lebih besarnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatuhan, dimana

masyarakat tidak lagi hanya dipandang sebagai obyek pembangunan tapi sekaligus sebagai subyek pembangunan.

Pengelolaan keuangan daerah yang berakuntabilitas, tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2002: 63), yang mengatakan wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Lebih lanjut dijelaskan Mardiasmo (2002: 63), anggaran berfungsi sebagai : (1) alat perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat politik, (5) alat koordinasi dan komunikasi, (6) alat penilaian kinerja, (7) dan alat motivasi. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan kehendak kita bersama. Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintah yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik menuju suatu tatanan pemerintah yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapatkan dukungan dari publik. Ada kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik. Di pihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik.

Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung selaku salah satu pengelola dana publik kota Bandung harus mampu menyediakan informasi

keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten, dan dapat dipercaya, Untuk itu instansi ini dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang handal. Jika sistem informasi akuntansi yang dimiliki pemerintah daerah masih lemah, maka kualitas informasi yang dihasilkan sistem tersebut dapat menyesatkan bagi yang berkepentingan terutama dalam hal pengambilan keputusan. Demi kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan salah satu tugas pokok dan fungsi tersebut perlu meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelayanan sebagai upaya mewujudkan reformasi birokrasi.

Penelitian ini menitikberatkan permasalahan pada akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dijabarkan atau wujud dari pertanggungjawaban pejabat publik kepada publik tentang kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran. Dalam hal ini tentu Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung harus profesional dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah.

Adapun permasalahan dalam kegiatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yaitu Efektifitas penyerapan anggaran yang rendah, hal ini diindikasikan karena masih banyaknya realisasi anggaran yang belum optimal. Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014 menunjukkan bahwa jumlah anggaran yang terealisasi sebesar 61,01%, ini menandakan belum terserapnya anggaran dengan optimal yang menyebabkan efektifitas penyerapan anggaran dan akuntabilitas di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung masih rendah.

Selain itu, penulis juga menemukan permasalahan lain yang berkaitan dengan akuntabilitas di Dinas Marga dan Pengairan Kota Bandung, hal ini dapat terlihat dari pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan target, bahkan ada yang hanya mencapai 33,33 % yaitu pada target sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik yang prima.

Dari pencapaian target sasaran di Dinas Marga dan Pengairan Kota Bandung juga terdapat beberapa indikator sasaran yang belum mencapai target yaitu sebanyak 5 indikator sasaran yang belum mencapai target yaitu pada indikator sasaran : (1) Terwujudnya pembangunan infrastruktur jalan di PPK, (2) Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata, (3) Persentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik, (4) Persentase minimal penanganan rutin banjir kurang dari 2 jam, (5) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik yang prima.

Hal ini tentu mengindikasikan bahwa dalam menjalankan program atau sasaran tersebut tentu memiliki hambatan, diduga akuntabilitas dalam mengelola keuangan masih belum optimal. Berdasarkan uraian fenomena di atas, peneliti tertarik dan terdorong untuk meneliti lebih lanjut tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang berdampak pada akuntabilitas. Hasil penelitian ini peneliti tuangkan dalam sebuah skripsi berjudul: ***“Pengaruh Pengelolaan Keuangan terhadap Akuntabilitas Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Tahun 2014”***

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pengamatan dan data yang diperoleh, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Tingkat efektifitas penyerapan anggaran yang rendah yaitu sebesar 61,01 %, hal ini diindikasikan karena masih banyaknya realisasi anggaran yang belum optimal. Hal ini disebabkan karena kurang matangnya pengelolaan keuangan.
2. Tingkat akuntabilitas rendah, hal ini dapat terlihat dari pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan target, bahkan ada yang hanya mencapai 33,33 % yaitu pada target sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik yang prima.
3. Salah satu tingkat pencapaian indikator kinerja utama Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) masih rendah yang hanya mencapai 57,14 % dan tidak sesuai dengan yang ditargetkan.

1.3 Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa terdapat permasalahan mengenai pengaruh pengelolaan keuangan terhadap akuntabilitas Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung. Maka penulis merumuskan permasalahan yang terjadi sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara perencanaan keuangan terhadap akuntabilitas Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung?

2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan keuangan terhadap akuntabilitas Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung?
3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung?
4. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara perencanaan keuangan terhadap akuntabilitas Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan keuangan terhadap akuntabilitas Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil peneliti ini diharapkan dapat memberi nilai positif dan memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan pengetahuan tentang ilmu administrasi keuangan Negara khususnya tentang pengelolaan keuangan dan akuntabilitas.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam bidang Administrasi Publik secara teoritis maupun praktis serta sebagai bahan untuk menerapkan dan membandingkan pengetahuan yang diperoleh peneliti antara teori dengan kenyataan di lapangan.

b. Bagi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung

Dalam hal ini akan memperoleh tambahan informasi dan masukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan.

c. Bagi Kampus UIN

Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi dan tuntutan pembangunan pada umumnya.

d. Untuk Umum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pemahaman terhadap administrasi keuangan negara harus dimulai dengan terlebih dahulu mengetahui pengertian administrasi keuangan negara.

“Arifin P. Soeria Atmadja; (2010: 10), bahwa keuangan negara dalam arti luas meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Keuangan Negara pada Perjan, Perum, dan sebagainya, sedangkan dalam arti sempit hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkan nya.”

Pengelolaan keuangan negara didasarkan atas prinsip-prinsip yang sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan melalui penerapan asas-asas klasik maupun asas-asas baru dalam pengelolaan keuangan negara. Asas-asas klasik tersebut meliputi: asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi. Asas-asas baru yang diterapkan sebagai cerminan dari *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara meliputi asas-asas: akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Fungsi dari diterapkannya asas-asas tersebut adalah untuk mendukung terwujudnya *good governance*, menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip

pemerintahan daerah dan memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi serta otonomi daerah. Dan menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara.

Adapun pengelolaan keuangan daerah didefinisikan menurut Abdul Halim, sebagai berikut

“Abdul Halim (2007:330) Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pengurusan umum berkaitan dengan APBD, sedangkan pengurusan khusus berkaitan dengan barang inventaris daerah.”

Dimensi dari pengelolaan keuangan daerah menurut Baldric Siregar (2015:11), diantaranya :

1. Perencanaan keuangan daerah
2. Pelaksanaan keuangan daerah
3. Penatausahaan keuangan daerah
4. Pelaporan keuangan daerah
5. Pertanggungjawaban keuangan daerah
6. pengawasan keuangan daerah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka peneliti hanya mengambil tiga dimensi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Yaitu :

1. Perencanaan Keuangan Daerah
2. Pelaksanaan Keuangan Daerah
3. Pelaporan Keuangan Daerah

Berkaitan dengan akuntabilitas, Indra Bastian memberikan definisi mengenai akuntabilitas

“Indra Bastian (2010: 385) akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang/ badan hukum / pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban”

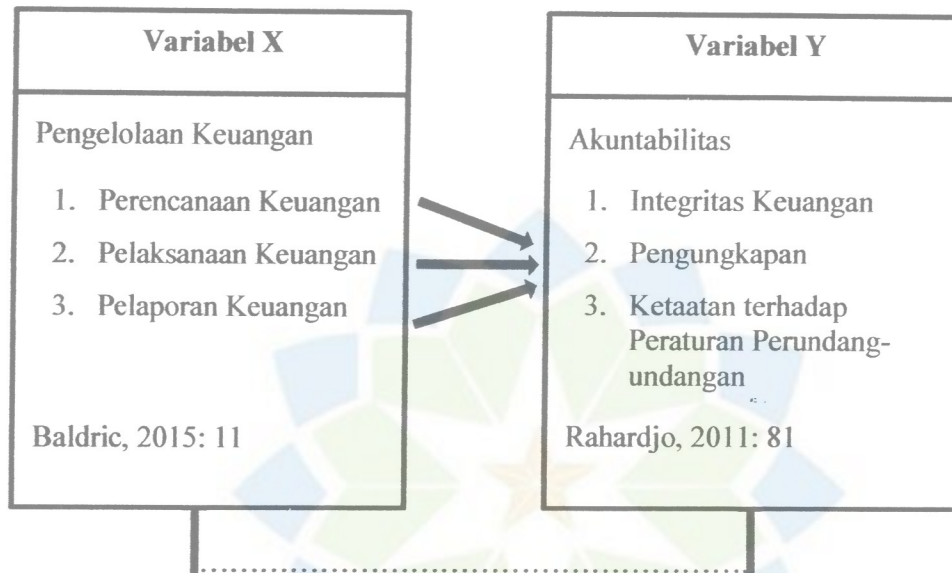
Menurut Rahardjo (2011: 81) terdapat 3 dimensi akuntabilitas, yaitu :

1. Integritas Keuangan
2. Pengungkapan
3. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan demikian peneliti berpendapat bahwa adanya pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pemerintah daerah. Hal tersebut akan disederhanakan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Penulis setelah diolah

1.7 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan, Bentuk hipotesis yang akan diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih.

Atas kerangka berpikir yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis asosiatif penelitian sebagai berikut :

1. H_0 = Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara perencanaan keuangan daerah terhadap akuntabilitas Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kota Bandung.

H_a = Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara perencanaan keuangan daerah terhadap akuntabilitas Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kota Bandung.

2. H_0 = Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan keuangan daerah terhadap akuntabilitas Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kota Bandung.

H_a = Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan keuangan daerah terhadap akuntabilitas Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kota Bandung.

3. H_0 = Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kota Bandung.

H_a = Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kota Bandung.

4. H_0 = Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kota Bandung

H_a = Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kota Bandung

